

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Gubernur Anies Didesak Perketat Izin Bangunan

## Marak Pelanggaran

**KEBAYORAN BARU (Pos Kota)** - Maraknya pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi sorotan. Untuk itu warga mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat izin pembangunan di kawasan tersebut.

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB) Rachmat HS, mengaku sangat prihatin dengan maraknya pelanggaran izin bangunan.

"Jika ini dibiarkan, kami khawatir pelanggaran IMB semakin parah di kawasan Pondok Indah. Makanya saya meminta Pak Anies dapat menginstruksikan Satpol PP menertibkan pelang-

garan IMB di Pondok Indah," ungkap Rachmat HS, Rabu (18/3).

Menurutnya, Satpol PP DKI jangan gentar menertibkan bangunan yang tidak sesuai aturan. Satu contoh, bangunan hunian di Jalan Sekolah, Pondok Indah, yang melanggar ambang batas ketinggian melebihi tiga lantai.

Bangunan tersebut sampai saat ini belum juga tersentuh padahal jelas melanggar. "Saya minta Satpol PP jangan melempem, tegakkan Perda (Peraturan Daerah) kepada semua yang melanggar aturan," tegasnya.

Selain itu Rachmat juga minta tindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan ini harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Tidak terkecuali ter-

hadap pembangunan di Pondok Indah yang melanggar.

Sebab semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. "Di mata hukum semua masyarakat sama, jangan terbang pilih, Ketinggian bangunan itu jelas merusak tata kota yang sudah direncanakan," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Afdal Satam, warga Jalan Sekolah Duta III PC 26 RT 02/14, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jaksel. Dia mengaku kecewa dengan sikap aparat Pemkot Jaksel yang dinilai terbang pilih.

Karena tidak ada tindakan dia terpaksa melaporkan masalah tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (16/3). **(wandi/ruh)**